

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Anshari Ritonga, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak dan Perpajakan Indonesia*. (Jakarta: Pustaka El Manar,2017).
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Armico, 2017).
- Darussalam, Danny Septriadi, B. Bawono Kristiaji, *TRANSFER PRICING, STRATEGI, DAN PANDUAN PRAKTIS DALAM PERSPEKTIF PAJAK INTERNASIONAL.*, (Jakarta, Juli 2013).
- Direktor Jenderal Pembendaharaan, *SERIAL EDUKASI KEUANGAN NEGARA*, Edisi 1.
- Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", Vol.9 No.2 (2013).
- Djulaeka, Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019).
- Erly Suandy, *Perencanaan Pajak, Salemba Empat*, (Jakarta, 2011).
- Edi Slamet Irianto, *POLITIK HUKUM PAJAK INDONENSIA DALAM PRAKTIK KONTEMPORER*, (BOROG: Moeka Publishing, 2022).
- Gunadi. *Pajak International*. (Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta), 2007.
- Gunadi, *Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)*, Edisi Revisi 2016, (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2016).
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Gadja Mada University Press, Yogyakarta, 1993).
- Haidir Rachman, *Pengakuan Bersalah Terdakwa Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Bekasi: CV. Intelektual Writer, 2021).
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia Publishing, Malang, 2005).
- John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum. Kencana Prenada*. (Media Group. Jakarta, 2011)

- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008).
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1987).
- Lawrence M. Friedman, *Legal Theory*, (New York: Columbia University Press, 1967).
- Jonker Sihombing, *Pokok-Pokok Hukum Pajak*, (Jakarta: Universitas Pelita Harapan, 2020).
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016).
- Soerjono Soekanto, *Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan di Indonesia Suatu Tinjauan Secara Sosiologis*, (Jakarta: UI Press, 2013).
- Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005).
- Sri Rahayu Oktoberina, *Butir-butir Pemikiran Dalam Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2008).
- John Rawls, *Frans Magnis-Suseno Etika Politik* (Jakarta: Gramedia, 1987).
- United Nations, *Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries*. (2017)
- W.B. Ilyas & R. Burton, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013).
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2009).

Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 Tahun 2020 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Menteri Keuangan No. 213/PMK.03/2016 Tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya.

Jurnal

Pamungkas, Hanggoro, Penyelesaian Sengketa Pajak, *Binus Business Review*, vol. 2, no. 1, (2011). 511-563 DOI: <https://doi.org/10.21512/bbr.v2i1.1162>

Santi, Aprilia T. "Transfer Pricing terhadap Penerimaan Negara pada Sektor Pajak di Indonesia." *e-Journal Lentera Hukum*, volume 3, (2016). 74-91, DOI:10.19184/ejlh.v3i1.9559.

Wahyudi, Ickhsanto, "PENGARUH ASET TIDAK BERWUJUD, UKURAN PERUSAHAAN, KEPATUHAN PERPAJAKAN, DAN LEVERAGE TERHADAP TRANSFER PRICING", *Jurnal Akuntansi* Volume 13 (2021). 200-401 DOI: <https://doi.org/10.28932/jam.v13i2.3885>

Hardiyanto, Ivan. "Permasalahan Transfer Pricing dalam Undang-undang Pajak di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Argumentum*, vol. 6, (2019), 1082-1103, DOI:10.24123/argu.v6i1.1859.

Hiariej, Edward O.S, "Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, vol. 21 (2021): 1-11, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.1-12>

Hardiyanto, Ivan, "Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya (September)" Vol. 7 No. 1 (2018), DOI <https://doi.org/10.24123/jimus.v7i1.1248>

Waluyo, Trihadi. "PEMERIKSAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG TIDAK MENYAMPAIKAN SPT. KETENTUAN DAN PEMILIHANNYA SESUAI SE-15/PJ/2018". *Simposium Nasional Keuangan Negara* 2, no. 1 (2020): 677-698. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/576>

Hasil Penelitian

Aprilia TRISANTI, "Transfer Pricing Terhadap Penerimaan Negara Pada Sektor Pajak Di Indonesia", Skripsi, Jember: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember, 2019

Edy Gunawan, "KEADILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG PATUH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANGN NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK", Disertasi, Tangerang: program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitar Pelita Harapan, 2017

Website

Ageng Prabandaru, "Materi Perpajakan Umum, Pahami dan Ketahui Bidang Pajak Lebih Jauh" <https://klikpajak.id/blog/berita-pajak/materi-perpajakan-umum-pahami-bidang-pajak-lebih-jauh/#:~:text=UU%20KUP%20Nomor%2028%20Tahun%202007%20Pasal%201%20Ayat%201,-Undang%20Dundang%20ini&text=Pajak%20didefinisikan%20sebagai%20kontribusi%20wajib,bagi%20sebes> Di akses 19 November 2022.

Badan Pustaka Statistik, "Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)", <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/2/realisasi-pendapatan-negara.html>, diakses pada 25 Juni 2023.

Bisnis.com, "OECD : Kasus Transfer Pricing Meningkat",
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190918/259/1149724/oecd-kasus-transfer-pricing-meningkat>. Di akses 19 November 2022.

Hafidh, "5 Metode Penentuan Transfer Pricing yang Wajar".
<https://klikpajak.id/blog/metode-transfer-pricing-pajak-wajar/> di akses 11 November 2023.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, "Stabilisasi Alokasi Distribusi, Tiga Fungsi Penting APBN"
<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Stabilisasi-Alokasi-Distribusi-Tiga-Fungsi-APBN> Di akses 19 November 2022.

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN, "Gambaran Realisasi APBN Tahun 2022",
<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sampit/id/data-publikasi/berita-terbaru/2899-gambaran-umum-apbn-tahun-2022.html> di akses 19 November 2022.

METRO KALTARA "Keadilan Hukum."
<https://www.metrokaltara.com/keadilan-hukum/> Di akses 19 November 2022.

OnlinePajak, "Transfer Pricing, Kenali Istilah Finansial Ini dan Tujuan Penerapannya!",
<https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/transfer-pricing> di akses 19 November 2022.

Pajakku, Kontribusi Pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
<https://www.pajakku.com/read/606d7432eb01ba1922cca74d/Kontribusi-Pajak-dalam-Anggaran-Pendapatan-dan-Belanja-Negara> di akses 19 November 2022.

Rani Maulida, "Mengenal Self Assessment dalam Sistem Perpajakan di Indonesia",
<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/self-assessment-system-pajak>, di akses 19 November 2022.

Reza, M., "Kepastian Hukum. Diambil dari Metro Kaltara"
<https://www.metrokaltara.com/kepastian-hukum/#:~:text=Kepastian%20hukum%20secara%20normatif%20adalah,mengatur%20secara%20jelas%20dan%20logis.&text=Menurut%20Gustav%20Radbruch%2C%20terdapat%20dua,hukum%20dalam%20atau%20dari%20hukum>. Di akses 19 November 2022

Surat Keputusan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00167/KEB/WPJ.33/2019 tanggal 21 Agustus 2019

Surat Keputusan Pengadilan Pajak, Jakarta Nomor PUT-011391.15/2019/PP/MXXB

